

Minimum Wage and Structural Poverty: A Mediation Analysis Based on Labor Market Theory in Jambi Province

Siswoyo¹, Mainita², Adi Putra³, Bambang Niko Pasla⁴

¹ Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

⁴ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding author email: mainitaita@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the effect of the Provincial Minimum Wage (UMP) on poverty in Jambi Province by examining the mediating role of the open unemployment rate. **Background Problems:** The minimum wage is a policy instrument used to enhance public welfare by increasing workers' income. However, in practice, increases in the UMP do not always lead to a direct reduction in poverty, particularly when labor market dynamics do not support wage policy impacts. From 2014 to 2023, the UMP in Jambi Province rose from IDR 1,502,230 to IDR 2,943,033. Nevertheless, poverty rates fluctuated, peaking in 2020 at 288,100 people and declining to 280,680 in 2023. These fluctuations suggest that the rise in the minimum wage has not produced a consistent effect on poverty reduction. **State the problem or phenomena studied in this paper and specify the research question(s) in one sentence.** **Novelty:** The novelty of this research lies in the application of mediation analysis to examine the extent to which open unemployment mediates the effect of the UMP on poverty. This approach refers to the Labor Market Segmentation Theory and Efficiency Wage Theory. **Research Methods:** This study uses a quantitative approach and employs mediation analysis with the help of SPSS software. **Finding/Results:** The results show that the UMP has a significant negative effect on open unemployment ($\beta = -0.0005$; $p = 0.012$), and open unemployment significantly increases poverty ($\beta = 5.700$; $p = 0.031$). The direct effect of UMP on poverty becomes insignificant when mediated by unemployment ($\beta = 0.0025$; $p = 0.082$). The indirect effect is statistically significant (-0.00285 ; 95% CI $[-0.0051, -0.0009]$). **Conclusion:** Open unemployment fully mediates the relationship between UMP and poverty. Therefore, the effectiveness of UMP policy in reducing poverty highly depends on the government's success in creating sufficient employment opportunities.

Keywords: Provincial Minimum Wage¹; Poverty Rate²; Mediation³; Unemployment⁴

Abstrak— Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan peran tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel mediasi. **Latar Belakang Masalah:** Upah minimum merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan pekerja. Namun, dalam praktiknya, peningkatan UMP tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, terutama ketika dinamika pasar tenaga kerja belum sepenuhnya mendukung. Selama periode 2014 hingga 2023, UMP di Provinsi Jambi meningkat dari Rp1.502.230 menjadi Rp2.943.033. Namun, angka kemiskinan justru mengalami fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2020 sebesar 288.100 jiwa dan turun menjadi 280.680 jiwa. Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum belum memberikan dampak langsung yang konsisten terhadap pengurangan kemiskinan. **Kebaruan:** Kontribusi kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis mediasi, yang menguji sejauh mana tingkat pengangguran terbuka menengahi pengaruh UMP terhadap kemiskinan. Pendekatan ini mengacu pada teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja dan Teori Upah Efisiensi. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis mediasi menggunakan bantuan SPSS. **Temuan/Hasil:** Hasil analisis menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka ($\beta = -0,0005$; $p = 0,012$), dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ($\beta = 5,700$; $p = 0,031$). Pengaruh langsung UMP terhadap kemiskinan menjadi tidak signifikan setelah dimediasi oleh pengangguran ($\beta = 0,0025$; $p = 0,082$). Efek tidak langsungnya signifikan ($-0,00285$; CI 95% $[-0,0051, -0,0009]$). **Kesimpulan:** Pengangguran terbuka memediasi secara penuh hubungan antara UMP dan kemiskinan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan UMP sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Kata kunci: Upah Minimum Provinsi¹; Tingkat Kemiskinan²; Mediasi³; Pengangguran⁴



1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan distribusi pendapatan, serta penanggulangan kemiskinan (Purnomo & Istiqomah, 2019). Ketidaksetaraan distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan berdampak pada penurunan kemiskinan secara inklusif (Istiqomah, 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu instrumen kebijakan yang diyakini dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan adalah kebijakan upah minimum, karena memiliki hubungan langsung dengan pendapatan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dikemukakan (Sulistiawan, 2023), dimana upah minimum memiliki efek negatif signifikan terhadap kemiskinan secara langsung. Artinya, semakin tinggi upah minimum, semakin rendah tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan hubungan langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjamin penghasilan minimum bagi para pekerja. Penetapan UMP setiap tahun merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 18 Tahun 2022, yang mempertimbangkan variabel ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas (UU No.13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia, n.d.). Secara teoritis, *George Stigler* menjelaskan bahwa upah minimum yang ditetapkan secara rasional dapat meningkatkan pendapatan kelompok pekerja miskin dan menjadi instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama jika didukung oleh pasar tenaga kerja yang dinamis. Namun, efektivitas kebijakan upah dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya UMP, melainkan juga oleh kondisi ketenagakerjaan, terutama tingkat pengangguran (Sihotang & Hermanto, 2025).

Dalam konteks ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berperan sebagai variabel mediasi

yang dapat menjelaskan bagaimana dan sejauh mana UMP berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan teori mediasi kausal dari *Baron dan Kenny*, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat disalurkan melalui perantara (mediator) yang menjelaskan mekanisme hubungan tersebut (Zhang & Ding, 2025). Jika peningkatan UMP mampu menurunkan angka pengangguran, maka secara tidak langsung UMP juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, apabila pasar tenaga kerja tidak responsif terhadap kenaikan upah, maka kebijakan UMP berpotensi tidak efektif (Millenia Putri & Zaini Putri, 2021).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi selama periode 2014–2023. Jumlah penduduk miskin meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 288.100 jiwa akibat dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 280.680 jiwa. Rata-rata tingkat kemiskinan selama dekade terakhir tercatat sekitar 285 ribu jiwa. Di sisi lain, TPT juga mengalami dinamika dari 5,08% pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,13% pada 2020, dan menurun kembali ke 4,53% pada 2023. Sementara itu, UMP Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan, dari Rp1.502.230 pada 2014 menjadi Rp2.943.033 pada 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun UMP mengalami peningkatan secara konsisten, tingkat kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan tren penurunan yang stabil.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan peran mediasi dari variabel TPT. Melalui pendekatan analisis jalur mediasi (*mediation analysis*), penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh UMP terhadap kemiskinan disalurkan melalui pengaruhnya terhadap pengangguran. Dengan pemahaman ini, penelitian tidak hanya mengukur hubungan langsung antar variabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme kausal yang mendasari hubungan tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian ekonomi tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam

merancang kebijakan upah minimum yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama:

Hipotesis 1 (Pengaruh Langsung):

H1: ($UMP \rightarrow TK$). Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Hipotesis 2 (Pengaruh Tidak Langsung melalui Mediasi):

H2: ($UMP \rightarrow TPT \rightarrow TK$). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memediasi secara signifikan pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Jika dibutuhkan, saya juga bisa bantu menyusun rumusan hipotesis nol (H_0) dan alternatif (H_1) untuk keduanya.

2. TINJAUAN LITERATUR

1. Upah Minimum dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan upah minimum telah lama menjadi instrumen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pekerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Menurut Stigler, upah minimum yang ditetapkan secara wajar dapat meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan menurunkan tingkat kemiskinan (Susanto & Windyastuti, 2023). Namun, dampak kebijakan ini sangat tergantung pada struktur pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi makro. Dalam konteks negara berkembang, kenaikan upah minimum juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mendorong keadilan ekonomi (Ivanovi Sulistyaningrum et al., 2022).

2. Pengangguran sebagai Dampak Sampingan Upah Minimum.

Salah satu tantangan dari penerapan kebijakan upah minimum adalah kemungkinan timbulnya pengangguran. Teori Efficiency Wage yang dikembangkan oleh Shapiro & Stiglitz (1984) menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat mendorong peningkatan produktivitas, tetapi juga berpotensi membuat perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional (Marina et al., 2021). Selain itu, teori segmentasi pasar tenaga kerja Doeringer & Piore, 1971) menjelaskan bahwa dampak upah minimum tidak seragam di seluruh sektor ekonomi; sektor

informal cenderung tidak merespons kebijakan ini secara langsung, sehingga menciptakan ketimpangan struktural (Machado Parente, 2024).

3. Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Sosial

Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial (Zahra et al., 2019). Kemiskinan struktural sering kali berakar pada kelemahan sistemik dalam struktur ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan melalui upah minimum tidak akan efektif tanpa perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan, termasuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas (Sihotang & Hermanto, 2025).

4. Studi Empiris Terkait

Berbagai studi terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang menemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu menimbulkan pengangguran dan bahkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dikemukakan oleh (Cazcarra, 2024) dalam studi yang menganalisis dampak kenaikan upah minimum di Spanyol terhadap ketimpangan dan lapangan kerja. Hasil menunjukkan bahwa kenaikan upah tidak hanya tidak menyebabkan pengangguran meningkat, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan lapangan kerja bersih. Sebaliknya, studi di konteks negara berkembang seperti Indonesia (Sinaga & Marbun, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan UMP hanya efektif dalam menurunkan kemiskinan jika diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Hal ini menegaskan pentingnya peran mediasi dari variabel pengangguran dalam efektivitas kebijakan upah minimum.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian secara objektif melalui data numerik. Pendekatan ini berlandaskan pada filosofi positivisme, di mana fenomena sosial dapat diukur secara sistematis dan diuji menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif dilakukan pada populasi atau sampel tertentu dan melibatkan penggunaan instrumen kuantitatif yang menghasilkan data

berbentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder berupa data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber resmi seperti dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014 hingga 2023.

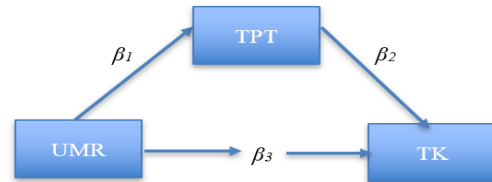
Data ini dipilih karena mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, termasuk referensi daring yang terpercaya. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik yang dipublikasikan oleh BPS, khususnya yang berkaitan dengan indikator pengangguran, upah minimum, dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Data ini kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam analisis.

Analisis data penelitian dilakukan setelah data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel, digunakan *analisis regresi mediasi*, sehingga akan guna diketahui apakah variabel tingkat pengangguran terbuka dapat menjadi mediator antara variabel independen (UMP) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Dalam model ini, diasumsikan bahwa UMP tidak hanya mempengaruhi tingkat kemiskinan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui tingkat pengangguran terbuka. Alasan penggunaan variabel mediasi adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), dengan alasan ketika UMP meningkat, beberapa perusahaan mungkin mengurangi tenaga kerja karena biaya tenaga kerja meningkat, sehingga TPT naik. Selanjutnya, TPT yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kemiskinan serta berdasarkan teori pasar tenaga kerja dualistik dan segmentasi pasar mendukung bahwa peningkatan UMP bisa berdampak pada pasar tenaga kerja informal/formal. Berikut jalur hubungan antara UMP (X) dan TK (Y) dengan variabel mediasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 1 Jalur hubungan antara UMP (X) dan TK (Y) dengan mediasi (TPT)

Penjelasan jalur:

- $UMP \rightarrow TPT (\beta_1)$: Uji apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- $TPT \rightarrow TK (\beta_2)$: Uji apakah TPT



berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (TK).

- $UMP \rightarrow TK (\beta_3)$: Uji apakah UMP berpengaruh langsung terhadap TK (jalur langsung).
- Efek tidak langsung (mediasi) = $\beta_1 \times \beta_2$
- Efek total = Efek langsung (β_3) + Efek tidak langsung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara UMP (X) dan TK (Y) menghasilkan Model Mediasi yaitu $UMP \rightarrow TPT \rightarrow TK$, dengan variable X (Upah Minimum Provinsi), variable M (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan variable Y (Tingkat Kemiskinan)

Penggunaan Model regresi mediasi yang digunakan terdiri dari tiga langkah analisis:

- **Langkah pertama (path c):** Menguji pengaruh langsung UMP terhadap tingkat kemiskinan, dengan model $Y = \alpha + \beta_1 X + e$, Dimana Y (Tingkat Kemiskinan), X (Upah Minimum Regional), β_1 (Koefisien regresi) dan e (Error Term)
- **Langkah kedua (path a):** Menguji pengaruh UMP terhadap variabel mediasi, yaitu tingkat pengangguran terbuka dengan model $Z = \alpha + \beta_2 X + e$ dengan Z (Tingkat Pengangguran Terbuka).
- **Langkah ketiga (path b dan c')** Menguji pengaruh UMP dan pengangguran secara simultan terhadap tingkat kemiskinan, dengan model $Y = \alpha + \beta_3 X + \beta_4 Z + e$. Dimana β_3 : (Efek langsung UMP terhadap kemiskinan setelah mempertimbangkan pengangguran) dan β_4 : (Efek pengangguran sebagai mediator).

Untuk menguji keberadaan efek mediasi, digunakan pendekatan Baron dan Kenny (1986) serta uji Sobel guna melihat signifikansi jalur tidak langsung. Jika pengaruh UMP terhadap kemiskinan menurun secara signifikan setelah variabel pengangguran dimasukkan dalam model, dan pengaruh UMP terhadap pengangguran serta pengangguran terhadap kemiskinan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efek mediasi. Uji hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Uji t juga digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berikut ini menjelaskan hubungan antara UMP (X) dan TPT (M).

Tabel 1: Model Regresi UMP terhadap TPT (Path a)

Variabel Bebas	Koefisien (β)	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	6.120	0.850	7.200	0.000
UMP	-0.0005	0.0002	-3.570	0.012

$R^2 = 0.62$

$F(1,8) = 12.74$

Sig. F = 0.012

Tabel 1 diatas menjelaskan hubungan antara UMP (X) dan TPT (M), dimana Koefisien UMP sebesar -0.0005 berarti setiap kenaikan 1 unit UMP (Rp1) akan menurunkan TPT sebesar 0.0005 poin. Nilai signifikansi $0.012 < 0.05$, menunjukkan bahwa UMP berpengaruh signifikan terhadap TPT. Sedangkan nilai $R^2 = 0.62$ menunjukkan bahwa model menjelaskan 62% variasi dalam TPT dan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara UMP dan TPT (jalur a).

Tabel 2: Model Regresi TK terhadap UMP dan TPT (Path b & c')

Variabel Bebas	Koefisien (β)	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	255.000	15.400	16.56	0.000
UMP	0.0025	0.0013	1.93	0.082
TPT	5.700	2.100	2.71	0.031

$R^2 = 0.58$

$F(2,7) = 6.05$

Sig. F = 0.031

Tabel 2 menjelaskan Ini adalah model penuh yang menguji pengaruh UMP dan TPT terhadap TK (jalur b & c'). Dimana UMP $\rightarrow$ TK: Koefisien 0.0025, tetapi tidak signifikan ($p = 0.082 > 0.05$) artinya tidak ada pengaruh langsung yang signifikan setelah mediator dimasukkan. TPT $\rightarrow$ TK: Koefisien 5.7, signifikan ($p = 0.031 < 0.05$) artinya TPT berpengaruh signifikan terhadap TK. Nilai koefisien diterminasi R^2 sebesar 0.58, berarti model ini menjelaskan 58% variasi TK. TPT menjadi penjelas penting bagi TK, dan hubungan langsung UMP terhadap TK melemah setelah TPT dikontrol $\rightarrow$ indikasi mediasi.

Tabel 3: Total Effect UMP terhadap TK (Path c)

Variabel Bebas	Koefisien (β)	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	240.000	18.300	13.11	0.000
UMP	0.0050	0.0016	3.12	0.020

$R^2 = 0.41$

$F(1,8) = 9.74$

Sig. F = 0.020

Pada Tabel 3 menjelaskan dimana pengaruh total UMP terhadap TK sebelum mediator (TPT) dimasukkan. Koefisien 0.0050 menunjukkan bahwa kenaikan UMP sebesar Rp.1 akan meningkatkan TK sebesar 0.005 unit. Nilai signifikansi $0.020 < 0.05$, menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara UMP dan TK. koefisien diterminasi R^2 sebesar 0.41, artinya model menjelaskan 41% variasi kemiskinan dipengaruhi Oleh UMP.. hasil tersebut juga menjelaskan dimana UMP secara total memengaruhi TK sebelum mediator TPT dikontrol.

Tabel 4: Efek Mediasi (Indirect Effect)

Jalur	Efek Indirek ($a \times b$)	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
UMP $\rightarrow$ TPT $\rightarrow$ TK	-0.00285	0.0012	-0.0051	-0.0009

Tabel 4 menjelaskan dimana efek mediasi dihitung dari hasil kali jalur a dan b $\rightarrow \beta_1 \times \beta_3 = -0.0005 \times 5.7 = -0.00285$. Bootstrapped Confidence Interval (CI): [-0.0051, -0.0009] tidak mencakup nol, artinya efek tidak langsung signifikan. Boot SE (*Standard Error*): memberikan ukuran ketelitian estimasi mediasi. Maka dapat dinyatakan Efek tidak langsung UMP terhadap TK melalui TPT adalah signifikan secara statistic dan menandakan mediasi terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan (TK) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel mediasi. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan UMP berdampak signifikan terhadap penurunan TPT, dan selanjutnya TPT memberikan pengaruh signifikan terhadap TK. Sementara itu, ketika TPT dimasukkan ke dalam model, pengaruh langsung UMP terhadap TK menjadi tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya mediasi penuh (*full mediation*) oleh variabel TPT dalam hubungan antara UMP dan TK.

Temuan ini dapat dijelaskan secara teoritis melalui Teori Pasar Tenaga Kerja Dualistik yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis pada tahun 1954, yang menyatakan bahwa terdapat dua sektor dalam pasar tenaga kerja: sektor formal yang menawarkan upah tinggi dan sektor informal yang umumnya memberikan upah rendah (Witjaksono, 2009). Kenaikan UMP di sektor formal berpotensi menciptakan daya tarik bagi pekerja dari sektor informal untuk berpindah, sehingga secara agregat meningkatkan partisipasi kerja dan mendorong penyerapan tenaga kerja, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran (Hohberg & Lay, 2015). Sejalan dengan itu, teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja Doeringer & Piore, 1971 menambahkan bahwa pengaruh UMP sangat bergantung pada fleksibilitas struktur pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Bila pasar bersifat adaptif, maka UMP mampu mendorong produktivitas, memperbaiki struktur pendapatan, dan mengurangi ketimpangan (Gultekin et al., 2024).

Dalam konteks Jambi, peningkatan UMP yang terjadi selama satu dekade terakhir tampaknya berhasil menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Kondisi ini kemudian berdampak pada perbaikan tingkat kemiskinan. Hal ini selaras dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui mekanisme upah minimum dapat meningkatkan daya beli dan memperkuat kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh UMP terhadap TK hanya efektif ketika disertai dengan perbaikan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Secara kebijakan, hasil ini memberikan implikasi bahwa penetapan UMP sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi pasar tenaga kerja lokal. UMP yang terlalu tinggi dapat memicu pengangguran jika tidak disertai peningkatan produktivitas, namun UMP yang terukur dan tepat sasaran berpotensi besar sebagai alat pengentasan kemiskinan. Dengan demikian dinyatakan bahwa TPT berperan strategis sebagai penghubung antara kebijakan upah dan penurunan kemiskinan, yang perlu diperhatikan secara serius dalam perencanaan ekonomi daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis selama periode 2014 hingga 2023, ditemukan bahwa UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPT, di mana peningkatan UMP berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya, TPT juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TK. Artinya, penurunan TPT cenderung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ketika TPT dimasukkan sebagai variabel mediasi, pengaruh langsung UMP terhadap TK menjadi tidak signifikan. Namun, pengaruh tidak langsung melalui TPT tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa TPT secara penuh memediasi hubungan antara UMP dan TK (*full mediation*). Dengan kata lain, peningkatan UMP baru akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan jika peningkatan tersebut mampu mengurangi pengangguran. Temuan ini menguatkan teori pasar tenaga kerja dualistik dan segmentasi pasar kerja, di mana kebijakan upah minimum dapat mendorong peningkatan kesejahteraan apabila diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. UMP tidak secara langsung menurunkan kemiskinan, tetapi melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tercermin dari menurunnya angka pengangguran.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebijakan UMP secara lebih luas, karena UMP bukan hanya sebagai instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui peran mediasi pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara upah minimum, produktivitas tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja agar dampak pengentasan kemiskinan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cazcarra, M. L. (2024). Machine Learning Analysis of the Impact of Increasing the Minimum Wage on Income Inequality in Spain from 2001 to 2021. <https://doi.org/10.21926/rpse.2501005>
- Fathiyah, F., Abdi Sukma, & Bambang Niko Pasla. (2021). Analysis of the Accuracy Level of Revenue and the Distribution Mechanism of Tax Revenue Sharing and Non-Tax Revenue Sharing for the Jambi Province Government in 2015-2019. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.16>
- Istiqomah, D. (2024). Economic Growth And Poverty: The Moderating Effect Of Income Inequality.
- Gultekin, D., Hisarciklilar, M., & Yusufi, F. (2024). Multiple faces of labour market segmentation within the Turkish construction industry. *Economic and Labour Relations Review*. <https://doi.org/10.1017/elr.2024.35>
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor and Development*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- Ivanovi Sulistyaningrum, B., Bhinadi, S.E, M.Si, Dr. A., & Dwi Astuti, S.E, M.Si, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Machado Parente, R. (2024). Minimum Wages, Inequality, and the Informal Sector, WP/24/159, July 2024.
- Marina, F., Nathália, L., Carlos, A. B., Luiz, E. G., & Rafael, G. (2021). Efficiency wage and work effort: Case study of a Brazilian multinational company. *African Journal of Business Management*, 15(1), 13–25. <https://doi.org/10.5897/ajbm2020.9088>
- Millenia Putri, E., & Zaini Putri, D. (2021). Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Nurkodri, M. S., Laryan, P., & Pasla, B. N. (2024). Analysis of the Contribution of Balance Funds to Total Government Revenues in Regency/Municipality in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 4(1). <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v4i1.64>
- UU No.13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia.
- Permata Sari, T., Sasti Ferina, I., & Pasla, B. N. P. (2025). Post-Regulatory Performance: Does Indonesia's New Fiscal Law Strengthen Local Government Revenue? . *Jurnal Prajaiswara*, 6(1), 509–517. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i1.174>
- Purnomo, S. D., & Istiqomah, I. (2019). Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment. *JEJAK*, 12(1), 238–252. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18591>
- Sihotang, S. M., & Hermanto, B. A. (2025). The Impact of Minimum Wage, Economic Growth, and Unemployment on Poverty Levels in Sumatera. *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(1), 113–124. <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i1.13002>
- Sinaga, R. H., & Marbun, M. (2020). Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS) Decision Support System for Web-Based Employee Candidates at PT.Indomarco Prismatama Using the ELECTRE Method. In *Intelligent Decision Support System (IDSS)* (Vol. 3, Issue 4). www.idss.iocspublisher.org/index.php/jids
- Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh UMP, Produk Domestik Bruto dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 7, Issue 1).
- Susanto, J., & Windyastuti, W. (2023). Increasing The Minimum Wage As A means Of Poverty Alleviation. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(2), 72–87. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.400>

- Witjaksono, M. (2009). Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum. In JESP (Vol. 1, Issue 1).
- Zahra, A., Fatin, A. A., Afuwu, H., & Auliyah, R. R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Kelayakan Hunian? <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jiko>
- Zhang, M., & Ding, P. (2025). Interpretable sensitivity analysis for the Baron-Kenny approach to mediation with unmeasured confounding. <http://arxiv.org/abs/2205.08030>
- Permata Sari, T., Sasti Ferina, I., & Pasla, B. N. P. (2025). Post-Regulatory Performance: Does Indonesia's New Fiscal Law Strengthen Local Government Revenue? . *Jurnal Prajaiswara*, 6(1), 509–517. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i1.174>